



---

**LAMPIRAN** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 17 TAHUN 2007  
TANGGAL : 21 Maret 2007

## **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

### **I. UMUM**

#### **1. Latar Belakang**

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Khususnya dibidang pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, perlu disempurnakan. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

#### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan pedoman teknis ini ialah menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan daripada pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi

---

[Lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah](#)

---

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . penggunaan barang milik daerah.

World's Largest Online Community.

Play Arcade, Card, Dice & RPG Games On Facebook.

Pengelolaan Barang Milik Daerah. . BARANG (LAMPIRAN 35 PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007); D) . laporan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 bisa download aplikasi .

Peran atau tugas penyimpan dan pengurus barang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu :  
09d271e77f

[architectural graphic standards pdf free download.rar](#)

[Sonic Charge MicroTonic v3.0.1 - R2R.rar](#)

[calculus early transcendentals soo tan solutions manual pdf.zip](#)

[IDM 6.03 build 6 full crack , key , patch.rar](#)

[business communication 11th edition lesikar pdf free download rar](#)

[solutions manual dynamics of structures 3rd edition ray w clough joseph penzien pdf](#)

[Understanding structural engineering From theory to practice Wai Fah Chen](#)

[recover my files v5 1 0 1824 license key rar](#)

[ruppert fox barnes invertebrate zoology free ebook download rar](#)

[REFOG Keylogger Personal Monitor 5.1.4.927.full.rar](#)